

## RETURN TO WEST IRIAN HOMELAND YEAR 1969

**Rahmad Istiadi\*, Marwoto \*\*, Kamaruddin \*\*\***

**Email: [istiadirahmad@yahoo.com](mailto:istiadirahmad@yahoo.com)**

**[marwotosaiman@yahoo.com](mailto:marwotosaiman@yahoo.com), [kamaruddinoemar@gmail.com](mailto:kamaruddinoemar@gmail.com)**

**No. Hp: 085278247590**

**History Education Study Program  
Faculty of Teacher's Training and Education  
University of Riau**

***Abstract:** Historically, the area of Indonesia is the territory of the former Dutch East Indies colony or territory of the former Dutch East Indies. Dutch East Indies archipelago is an area that is separated by seas. Evidence that the Dutch East Indies is fragmentary and does not constitute a single unit is used provided that the territorial sea Indies 3-mile (5.55 km). Indonesia As a nation that never colonized, has a separate area, is clearly a big loss for the people of Indonesia. The circumstances do not support our efforts to realize an independent nation, united, sovereign and towards a just and prosperous nation as stated in the preamble of the 1945 Constitution as a continuation of West Irian issue of dispute between Indonesia and the Netherlands officially emerging at the end of 1949. At that time in fact Indonesia is making vigorous efforts to find a way out through negotiations to resolve the political dispute between the two sides, with the mediation of the United Nations (UN). The aim of research to find out the background of a power struggle between the West Irian Indonesia and the Netherlands, to determine the parties involved in the dispute Indonesia and the Netherlands related usurpation of West Irian, to know the process of the return of West Irian to the Homeland. Researchers used methods of historical research and documentary that aims to analyze the problems detection and west Irian return to the Homeland. Results of research in general that the authors wrote West Irian back to the Homeland through several lengthy process ranging from diplomacy to confrontation lines.*

**Keywords: West Irian, Homeland, 1969, PEPERA**

## KEMBALINYA IRIAN BARAT KE NKRI TAHUN 1969

**Rahmad Istiadi\*, Marwoto \*\*, Kamaruddin \*\*\***

Email: [istiadirahmad@yahoo.com](mailto:istiadirahmad@yahoo.com)

[marwotosaiman@vhoo.com](mailto:marwotosaiman@vhoo.com), [kamaruddinoemar@gmail.com](mailto:kamaruddinoemar@gmail.com)

No. Hp: 085278247590

**Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau**

**Abstrak** : Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda atau wilayah eks Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang terpisah oleh laut bebas. Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda adalah terpisah-pisah dan bukan merupakan satu kesatuan adalah digunakannya ketentuan bahwa laut territorial Hindia Belanda 3 mil (5,55 km). Indonesia Sebagai bangsa yang pernah terjajah, memiliki wilayah yang terpisah-pisah, jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung upaya kita mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan menuju bangsa yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Masalah Irian Barat sebagai kelanjutan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara resmi baru timbul pada akhir tahun 1949. Pada masa itu justru Indonesia sedang melakukan usaha-usaha yang giat untuk mencari jalan keluar melalui perundingan untuk memecahkan sengketa politik antara kedua belah pihak, dengan perantaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan penelitian untuk mengetahui latar belakang perebutan kekuasaan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda, untuk mengetahui pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pertikaian Indonesia dengan Belanda terkait perebutan kekuasaan Irian Barat, untuk mengetahui proses kembalinya Irian Barat ke wilayah NKRI. Peneliti menggunakan metode penelitian historis dan dokumenter yang bertujuan untuk mendektesi dan menganalisis permasalahan kembalinya irian barat ke NKRI. Hasil penelitian yang secara umum yang penulis tulis Irian Barat kembali lagi ke NKRI melalui beberapa proses yang amat panjang mulai dari jalur diplomasi sampai ke jalur Konfrontasi.

**Kata Kunci:** Irian Barat, NKRI, 1969, PEPERA

## PENDAHULUAN

Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda atau wilayah eks Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang terpisah oleh laut bebas. Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda adalah terpisah-pisah dan bukan merupakan satu kesatuan adalah digunakannya ketentuan bahwa laut territorial Hindia Belanda 3 mil (5,55 km), berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939. (Winarno, 2007:110)

Indonesia Sebagai bangsa yang pernah terjajah, memiliki wilayah yang terpisah-pisah, jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung upaya kita mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan menuju bangsa yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Masalah Irian Barat sebagai kelanjutan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara resmi baru timbul pada akhir tahun 1949. Pada masa itu justru Indonesia sedang melakukan usaha-usaha yang giat untuk mencari jalan keluar melalui perundingan untuk memecahkan sengketa politik antara kedua belah pihak, dengan perantaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah melampaui masa-masa pasang-surut gelombang perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia semenjak Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tekad untuk di akui sebagai bangsa yang merdeka semakin mendapatkan simpati dunia. Kebulatan hati bangsa Indonesia dengan tegas telah di sebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Pengertian tentang seluruh tumpah darah Indonesia ialah keutuhan wilayah Indonesia tanpa mengecualikan satu diantara bagian yang lainnya, termasuk daerah Irian Barat. Sedangkan pihak Belanda waktu itu mempunyai pandangan lain, yakni mencoba memberi status tersendiri kepada Irian Barat, terpisah dari wilayah bekas Hindia Belanda selebihnya.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 kedua belah pihak yang bersengketa bersedia untuk berunding dalam suatu Konferensi Meja Bundar (KMB), yang dilangsungkan di kota Den Haag, Negeri Belanda. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil-wakil Republik dan Federal, berhadapan dengan delegasi Belanda. Komisi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia, yang bernama UNCI (United Nations Commission for Indonesia) bertindak sebagai pengawas bagi kelangsungan dan kelancaran perundingan tersebut.

Menurut delegasi Indonesia yang diketuai oleh Moh. Hatta, masalah kedaulatan Irian Barat telah tercakup dalam pengertian tentang kesediaan Pemerintah Belanda untuk menyerahkan dan mengakui kedaulatan atas seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat termasuk Irian Barat.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode ilmu-ilmu sosial, khususnya metode historis dan dokumenter, yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang berhubungan dengan Integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI.

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat digunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan yang akan datang.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1) Latar Belakang Terjadinya Perebutan kekuasaan Antara Indonesia Dan Belanda Terkait Masalah Irian Barat**

Indonesia telah diakui keberadaannya oleh dunia setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, ternyata hal itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kata “Daulat”. Pada masa kemerdekaan Indonesia saat itu, Indonesia sedang melakukan sebuah revolusi untuk membentuk pemerintahan mulai dari, menentukan kepala pemerintahan, menentukan UUD dan Pancasila sebagai dasar Negara, membentuk perlengkapan Negara, membentuk provinsi sebagai wilayah kekuasaan Indonesia dan lain-lain.

Pembentukan beberapa perlengkapan pemerintahan saat itu dikenal dengan rapat PPKI (Pembentukan Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada poin pembentukan provinsi ini, Indonesia awal merasa bingung hal dikarenakan menentukan wilayah perbatasan, apakah harus mengikuti wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit yang mempunyai wilayah kekuasaan yang begitu luas, atau harus mengikuti jalur luas kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Pada masa rapat PPKI inilah ditentukan wilayah kekuasaan Indonesia meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda.

Masa revolusi merupakan awal dari permasalahan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, karena pada masa ini telah terjadi beberapa gerakan pendaulatan di berbagai daerah yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan. Melihat situasi ini, Belanda bersama sekutunya kembali ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti tentara Jepang yang ditawan di Indonesia, selain itu juga ada keinginan yang kuat untuk menguasai kembali negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan Hindia Belanda dan umur kemerdekaan Indonesia masih seumur jagung.. Berbagai macam cara dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan Indonesia kembali, sehingga kembali bermunculan perlawanan dari rakyat Indonesia.

Kejadian yang dialami bangsa Indonesia ini kemudian menarik simpati wakil Ukraina di PBB untuk meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap keadaan Indonesia, namun gugatan tersebut ditolak (Dekker, 1997:192). Negara Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perselisihan hendaknya diselesaikan dengan jalan damai. Bangsa Indonesia mengadakan perundingan-perundingan damai dengan pihak Belanda. Akan tetapi, kesepakatan hasil perundingan-perundingan tersebut dilanggar oleh Belanda, bahkan Belanda telah melancarkan Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Kejadian ini menimbulkan kecaman internasional tak terkecuali Australia yang notabene merupakan bagian Negara sekutu yang sama dengan Belanda.

Selain itu juga kejadian tersebut kembali menarik simpati wakil-wakil di PBB untuk menyelesaikan masalah ini. Atas dasar Roem-Roijen Statement disepakatilah

oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan perundingan kembali melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) (Dekker, 1989:79).

Sebelum KMB dilaksanakan, pemimpin RI dan BFO terlebih dahulu mengadakan Konferensi Inter Indonesia (KII). Kabinet baru dibentuk dan digunakan sebagai delegasi Indonesia pada KMB. Konferensi ini diadakan di Den Haag, dipimpin oleh Perdana Menteri Kerajaan Belanda W. Drees, dan berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi-delegasi Republik Indonesia yaitu Moh. Hatta, delegasi BFO yaitu Sultan Hamid, delegasi kerajaan Belanda yaitu J.H. van Maarseven, serta UNCI sebagai wakil Dewan Keamanan PBB.

Persoalan KMB yang terberat adalah masalah Irian Barat yang sampai saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Adapun salah satu isi dari KMB adalah seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda merupakan wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat, dan butir isi lainnya berbunyi masalah Irian Barat akan di bahas nantinya. Belanda berusaha untuk memisahkan daerah ini dari Indonesia.

Alasan keduanya ingin mempertahankan Irian Barat dilatarbelakangi oleh beberapa hal, Indonesia masih berharap dan berpatokan dengan poin ke dua isi KMB masalah Irian Barat akan dibahas nantinya dan hal tersebut memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bisa mengembalikan Irian Barat, selain itu juga Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia dilatarbelakangi oleh landasan historis, pada saat kekuasaan kerajaan Majapahit yang saat itu menjadi kerajaan yang amat disegani berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke tanah papua, selain kerajaan Majapahit juga ada kerajaan Tidore yang kekuasaannya telah sampai ke wilayah Papua, sedangkan pihak Belanda berpendapat bahwa Irian Barat bukan merupakan wilayah kekuasaan Indonesia dan tidak bisa masuk ke bagian NKRI yang dikarenakan dari sudut pandang fisik orang Irian berbeda dengan mayoritas orang-orang Indonesia, orang Irian Barat ras nya adalah ras negroid sedangkan Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah ras melanesoid, dan selain itu juga tujuan Belanda untuk berada di tanah irian barat yaitu untuk memajukan orang-orang Irian Barat yang secara keseluruhan cenderung terbelakang bukan untuk tujuan menjajah.

## **2) Pihak-Pihak Yang Ikut Terlibat dalam Pertikaian Antara Indonesia Dengan Belanda Terkait Perebutan Kekuasaan Irian Barat**

### **a. Uni Soviet**

Perang dingin membawa pengaruh yang begitu besar dalam perubahan dunia, hal ini dikarenakan terdapat dua kekuatan besar yang memegang peranan penting saat itu, adapun dua Negara Super Power atau yang lebih dikenal dengan nama Negara Adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut berlomba-lomba dalam mencari dukungan untuk menghadapi satu sama lain. Adapun objek yang mereka tuju untuk mendapat dukungan salah satunya adalah Negara Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami permasalahan yang sangat rumit mengenai kedaulatan NKRI yang di ganggu oleh Belanda yang hendak menguasai Indonesia lagi.

Indonesia dan Uni Soviet menjalin kerjasama bilateral di mulai pada masa kemerdekaan Indonesia. dalam pengaruh dunia Kedekatan ini terjalin karena kesamaan Ideologi antara para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia terutama Soekarno dan

Tan malaka yang saat itu menjadi pemimpin gerakan kemerdekaan di Indonesia. Uni Soviet lah yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia dan dalam sidang umum PBB, delegasi soviet dalam siding PBB pada bulan januari 1946 menentang aksi invasi yang di lakukan Belanda terhadap Indonesia, meskipun dikatakan politik Indonesia saat itu adalah politik bebas aktif dan non-blok.

### **b. Amerika Serikat**

Pada tahun 1961 masa jabatan kedua President Eisenhower berakhir. Penggantinya adalah Presiden John F. Kennedy. Presiden Kennedy mengambil jalan yang berbeda dari yang biasa di tempuh Presiden Eisenhower. Pemerintah Eisenhower memandang negara-negara yang baru merdeka sebagai calon potensial untuk menjadi sekutu Negara-negara Blok Barat dalam konflik Perang Dingin melawan Blok Komunis. Sebaliknya itu pemerintahan Kennedy ingin lebih menghargai keinginan Negara-negara baru itu untuk bersikap netral dalam antogonisme internasional, sambil berharap bahwa dengan begitu akan terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara Amerika dengan Negara-negara tersebut. Pemerintah Kennedy yakin, kerjasama semacam itu dalam jangka panjang akan lebih efektif dalam mencegah Negara-negara itu menjadi komunis daripada secara langsung menentang pemerintahan-pemerintahan yang diduga condong ke kiri.

Ada dua kelompok penasihat utama yang membantu Presiden Kennedy dalam merumuskan kebijakan-kebijakan luar negrinya. Kelompok yang pertama bersikap anti-Indonesia dan anti-Presoden Soekarno, sedangkan kelompok yang kedua lebih menganut cara pendekatan yang positif terhadap Indonesia maupun pemerintahan Presiden Soekarno. Para penasihat yang berasal dari kelompok pertama cenderung berpandangan Eropa-sentris, khususnya dalam melihat berbagai masalah menyangkut kepentingan Belanda dan Indonesia. Orang-orang dari kelompok ini mendasarkan pandangan mereka atas persahabatan yang sudah lama terjalin antara AmerikaSerikat dan Belanda. Alasan lain adalah pentingnya posisi Belanda sebagai sekutu Amerika Serikat dalam ppertahanan NATO di Eropa Barat. Berdasarkan pertimbangan itu para penasehat dari kelompok ini cenderung mendukung posisi Belanda atas bekas koloninya. Mereka juga curiga bahwa pemerintahan Indonesia itu pro-komunis dan oleh karena itu tidak selayaknya mendapat dukungan dari Amerika.

### **c. Australia**

Hubungan antara Australia dengan Indonesia di mulai sejak menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap Indonesia bermula atas kesimpatikan Australia dengan perjuangan yang di lakukan oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang telah di jajah selama hampir 350 tahun oleh Belanda. Rasa simpati Australia tersebut pernah di ungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Evvat dalam kunjungannya ke Amerika Serikat.

Setelah dukungan yang di berikan oleh pemerintah Australia terhadap bangsa Indonesia dalam masalah mempertahankan kemerdekaan kedaulatan bangsa Indonesia dari Belanda, hubungan yang awalnya begitu baik dan cukup Harmonis tapi tiba-tiba menjadi rusak karena terjadi guncangan antara Indonesia dengan Australia dalam kaitannya dengan masalah Irian Barat. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan keduanya. IrianBarat adalah awal mulanya sebab terjadinya konflik besar

antara Australia dengan Indonesia. Pada tahun 1950 Pemerintahan Menzies menegaskan bahwa Australia memiliki kepentingan strategis yang penting pada masa depan administrasi Australia di Irian Barat. Bahkan, menurut Percy Spender Australia lebih memiliki kemiripan dengan wilayah Australia di Irian Barat dan Papua. Antara Indonesia dengan Australia dalam memandang wilayah Irian Barat melalui kaca mata yang berbeda. Indonesia mempunyai dua alasan yang di kemukakan untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatannya.

Sementara itu dari sudut pandang Australia adalah sebaliknya, Irian Barat mempunyai arti yang sangat penting bagi Australia. Ini di sebabkan karena pulau Irian sangat strategis jika di pandang dari sudut pertahanan, selain itu juga jika di pandang dari sudut fisiologi secara ras orang-orang Irian Barat mempunyai kesamaan secara fisik dengan masyarakat suku asli Australia, yaitu Aborigin

### **3) Proses Kembalinya Irian Barat Ke Wilayah NKRI**

#### **a. TRI KORA (Tri Komando Rakyat)**

##### **TRI KOMANDO RAKYAT**

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu Kolonialisme Belanda. Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada Rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan TRI KOMANDO sebagai berikut :

- 1) Gagalankah pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
- 2) Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
- 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta, 19 Desember 1961 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia SOEKARNO Pemimpin Besar Revolusi Indonesia /Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Bara.

#### **b. PERJANJIAN NEWYORK**

Adapun isi perjanjian New York antara lain sebagai berikut:

- 1) Sesudah disahkannya persetujuan Belanda-Indonesia, paling lambat pada tanggal 1 oktober 1962 UNTEA akan berada di Irian Barat
- 2) Pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat, tetapi dibawah kekuasaan UNTEA
- 3) Angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan
- 4) Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas atau keluar masuk bebas.

- 5) Mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia berkibar disamping bendera PBB.
- 6) Paling lambat tanggal 1 Mei 1963 UNTEA harus menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian New York, Irian Barat secara resmi masuk kewilayah NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Serah terima dari UNTEA kepada Republik Indonesia dilakukan di kota Baru (Holandia).

### **c. PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat)**

Irian Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah. Masuknya Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia merupakan hasil kesepakatan perjanjian yang di mediasi oleh PBB, adapun perjanjian itu dikenal dengan perjanjian New York ( New York agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962 yang di akhiri dengan penentuan pendapat rakyat (PEPERA).

Berpatokan pada hasil perjanjian di atas sebagai Hukum Internasional, dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya Barat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka dari itu di lakukanlah jajak pendapat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Irian Barat pada tahun 1969. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan PEPERA yang di karenakan letak pemukiman masyarakat Papua yang pada saat itu yang masih banyak berada di daerah-daerah terisolasi atau pedalaman dan di tambah pula dengan keadaan sumber daya manusia yang masih banyak belum mengenal kemampuan baca tulis, sehingga alasan itu dikhawatirkan dapat mempersulit ataupun nantinya dapat menghambat proses pelaksanaan PEPERA.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. SIMPULAN**

- a. Permasalahan Irian Barat merupakan masalah yang besar bagi perjuangan bangsa ini untuk menjaga keutuhan dari NKRI, hal ini dikarenakan permasalahan Irian Barat merupakan permasalahan internasional yang banyak beberapa pihak terlibat didalamnya, dan yang menjadi topik permasalahannya adalah pertikaian Indonesia dengan Belanda terkait wilayah kekuasaan di Irian Barat,
- b. Pertikaian Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat bermula pada persetegangan antara keduanya yang ingin memiliki wilayah kekuasaan Irian Barat. Dikubu Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat memang harus masuk ke wilayah NKRI, hal ini dikarenakan Irian Barat terdapat ikatan historis yang begitu kental dengan kerajaan-kerajaan Indonesia terdahulunya, seperti halnya Kerajaan Tidore, sehingga menimbulkan hubungan yang begitu erat terdahulunya. Sedangkan Belanda berpendapat bahwa Belanda bersikeras bahwa Irian Barat bukan bagian dari NKRI hal ini dilihat dari fisik orang-orang Irian Barat tidak sama dengan orang-orang Indonesia, selain itu Belanda lebih berhak atas Irian Barat dikarenakan tujuan dari kedatangan Belanda ke tanah Irian Barat adalah untuk memajukan Irian Barat yang mana secara keseluruhan Irian Barat masih keterbelakang

- c. Adapun pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pertikaian antara Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat yaitu pihak Amerika Serikat dan Australia.
- d. Amerika selaku Negara adikuasa yang memiliki kekuasaan besar dimata dunia ikut andil dalam pertikaian Indonesia-Belanda terkait masalah irian barat dimulai sejak pemerintahan Eisenhower. Pada masa pemerintahan Esinhower hubungan amerika dan Indonesia kurang baik, hal itu dikarenakan pandangan presiden amerika saat itu lebih cenderung mendukung belanda selaku bagian dari Negara sekutu Amerika Serikat. Pada saat itu terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara adikuasa itu berlomba-lomba mencari dukungan untuk berpihak kepada salah satu pihak. Saat itu yang bersedia untuk membantu Indonesia adalah pihak Uni soviet, dan membuat percaturan politik internasional semakin memanas. Untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat, presiden pengganti Esinhower, yakni John F. Kennedy berusaha untuk memperbaiki kesalahpahaman yang terjadi diantara keduanya. Masa pemerintahan beliau, Kennedy lebih bersikap netral.
- e. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia Negara sekutu satu-satunya yang mendukung Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia adalah Australia. Namun, amat disayangkan ketika permasalahan Irian Barat muncul menjadi masalah internasional hubungan Australia dengan Indonesia menjadi buruk. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan politik Australia atas wilayah Irian Barat, Australia beranggapan bahwa letak Irian Barat begitu strategis sebagai daerah pertahanan
- f. Masuknya Irian Barat ke Indonesia melalui beberapa proses yang begitu amat panjang. Adapun perjuangan tersebut berupa perjuangan diplomasi dan konfrontasi. Perjuangan konfrontasi yang dikenal dalam perjuangan wilayah Irian Barat atas Belanda yakni TRI KORA. Sedangkan perjuangan secara diplomasi yaitu dengan melalui perjanjian New York dan PEPERA..

## **REKOMENDASI**

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka dapatlah dikemukakan saran-saran sebagai berikut, antara lain:

- a. Sebagai bangsa yang besar yang memiliki ribuan pulau dan bermacam-macam adat istiadat, kita harus bisa menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Pemerintah harus bisa meminimalisir rasa kedaerahan yang berlebihan, menciptakan keadilan yang merata pada semua daerah dan yang paling penting adalah membasmi praktek KKN di Negara ini.
- b. Segala permasalahan yang mendera bangsa Indonesia kita jadikan sebagai motivasi semangat cinta tanah air dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Setiap permasalahan kita selesaikan bersama-sama tanpa adanya sikap emosional dan diselesaikan dengan bermusyawarah mencari solusi yang terbaik.
- c. Kita jadikan setiap peristiwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebagai iktibar atau peringatan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan iman

dan taqwa kita kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Semoga dengan iman dan taqwa, kita dapat membentengi bangsa ini khususnya diri sendiri dari derasnya pengaruh globalisasi dan modernisasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ar buzz me: Yogyakarta
- Bone Jr, Robert C, 1952, *The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Baratt)Problem*, Ithaca, New York.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dekker, N, 1997, *Sejarah Pergerakan dan Revolusi Nasional*. Malang: IKIP Malang.
- F. Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Bina Cipta
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah; Pengantar Metode Sejarah*. Terjemahan. Nugroho Susanto. Jakarta : Yayasan Penerbit UI
- Hadi dkk., Syamsul, 2007, *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- H. Moh. Yamin, 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid II.
- JRG. Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Jasmi, Khairul. 2002, *Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lopa, Baharuddin SH, 1962, *Djalannja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Daya Upaya, Djakarta.
- Makkateru, Syamsudin, 1975, *Asal Mula Nama Irian*, PT. Kinta Utama Murni, Jakarta
- Nazarudin Syamsudin. 1989. *Integrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta:PT. Gramedia
- Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Panitia Buku Kenangan, 1963, *Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*, Makassar.
- Saafroedin Bahar. 1996. *Integrasi Nasional: Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Surakhman, Winarno. 1982. *Pengantar Pengertian Ilmiah dan Metode Teknik*. Bandung : Karsani
- Suwardi, MS. 1998. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Pekanbaru : Cetakan Riau
- Syamsuddin Haris, et all. 1999. *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga
- Tomodok, E.M.. 1994, *Hari-hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tuhana Taufik. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global
- Usman, Husaini, dkk. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara
- Winarno, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi ke 2*, Surakarta: PT. Bumi Aksara.